

## KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF ILMU SOSIOLOGI

***Putri Anita Rahman<sup>1</sup>, Firman<sup>2</sup>, Rusdinal<sup>3</sup>***

Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Pascasarjana Universitas Negeri Padang  
Email: [putrianitarahman9@gmail.com](mailto:putrianitarahman9@gmail.com)

### Abstrak

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, politik, sosial budaya, dan partisipasi dalam masyarakat. Berbagai kebijakan dan program yang ada dirasakan masih kurang efektif dalam upaya menurunkan jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Hal ini terbukti dengan adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk miskin dari masa kemasa. penelitian ini deskriptif analisis yang berorientasi pada pemecahan masalah. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan strategi yang dapat diupayakan untuk meredam peningkatan kemiskinan yaitu Pertama, dengan kebijakan tidak langsung yaitu membenahi infrastruktur penyebab kemiskinan, Kedua, diperlukan intervensi pemerintah mengatur kegiatan ekonomi.

***Kata kunci:*** Fenomena, kemiskinan, ilmu sosial

### Abstract

Poverty is a multidimensional problem because it is related to the inability to access economically, politically, socially culturally, and participation in society. Various policies and programs are felt to be still less effective in reducing the number of people living below the poverty line. This is proven by the tendency to increase the number of poor people from the future. This research is a descriptive analysis which is oriented to problem solving. Furthermore, based on the results of the study conclusions can be drawn strategies that can be strived to reduce poverty increase. First, with an indirect policy that is fixing the infrastructure that causes poverty, Second, government intervention is needed to regulate economic activity.

***Keywords:*** Phenomenon, poverty, social science.

## PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah suatu <sup>1</sup> kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat disuatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak pada berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup. Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan. Akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat disuatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata

pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya.

Pengertian kemiskinan yang populer saat ini adalah kemiskinan yang seringkali dijumpai dinegara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga. Persoalan kemiskinan masyarakat dinegara-negara ini tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi telah meluas pada bentuk ketidakberdayaiaan secara sosial maupun politik. Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah. seperti negara-negara berkembang lainnya, kemiskinan adalah perkara besar di Indonesia. tingkat kemiskinan di Indonesia setiap tahun meningkat, menurut data statistik tentang tingkat kemiskinan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada bulan maret 2019 sebanyak 39,90 juta jiwa (17,75%) dibandingkan bulan februari 2018 jumlah penduduk yang mengalami peningkatan sebesar 3,95 juta jiwa. (Data BPS). Berbagai program untuk menanggulangi kemiskinan telah diadakan oleh pemerintah. Program-program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung fokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin sehingga program penanggulangan seperti ini tidak tepat sasaran. Penanggulangan kemiskinan haruslah kepada hak. Artinya Negara harus berusaha semaksimal mungkin memenuhi hak-hak dasar rakyatnya. Meliputi hak atas pendidikan, <sup>1</sup> kesehatan, perumahan, pekerjaan layak dan lain-lain (Pemprov Yogya.2017:11).

Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius dalam proses pembangunan nasional di Indonesia. masalah ini seolah-olah tidak dapat dituntaskan secara serius padahal upaya pemerintah telah memperkenalkan berbagai paket dan program yang melibatkan sejumlah pakar tentang kemiskinan. Hakekatnya, belum ada keberlanjutan (sustainability) sistem penanganan kemiskinan baik dalam satu rezim kekuasaan maupun pada saat peralihan rezim. Berdasarkan uraian tersebut

<sup>4</sup> permasalahan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia memang terus dilakukan sampai saat ini, baik melalui kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tetapi penurunan penduduk miskin tidak terlalu signifikan dan relatif masih cukup banyak. Pemerintah sudah berjuang terus menurunkan penduduk miskin didaerahnya dengan berbagai strategi, baik melalui kebijakan fiskal dalam APBD, maupun dengan melibatkan masyarakat miskin itu sendiri. Salah satu strategi yang dilakukan adalah menjadikan penduduk miskin sebagai subjek bukan sebagai objek sehingga penduduk miskin dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan yang dilakukan.

Tujuan untuk mensejahterakan kehidupan bangsa seolah hanya wacana saja. Semakin maraknya perencanaan dan kegiatan pembangunan belum mampu menanggulangi kemiskinan di Negeri Indonesia sehingga untuk mencari alternatif solusi kebijakan kedepan dalam upaya mempercepat mengentaskan kemiskinan diperlukan pemikiran dari berbagai lintas disiplin ilmu sosial.

### **Kajian Pustaka**

Diantara karya-karya ilmiah yang membahas tentang fenomena kemiskinan antara lain: *Yarlina Yacoub (2012)* melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat". Menggunakan variabel tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Dengan teknik analisis regresi. Hasil yang diperoleh antara lain: Tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Data empiris menunjukkan pola hubungan yang tidak selalu searah antara tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Pada kelompok keluarga yang sangat miskin, justru tingkat pengangguran rendah karena sebagian besar anggota keluarga bekerja untuk bisa bertahan hidup, terkadang anak-anak juga dilibatkan dalam bekerja dengan alasan penghasilan kepala keluarga atau orang tua

tidak mencukupi kebutuhan keluarga, terutama pada keluarga petani dengan pendidikan yang rendah (dari total angkatan kerja yang bekerja, 61,07 % nya berpendidikan SD ke bawah, sehingga pendapatan yang diterima rendah). *Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti* (2008), dalam penelitian yang berjudul “Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin”. Menggunakan alat analisis regresi berganda, dengan variabel: PDRB, jumlah penduduk, IPM, sektor pertanian, sektor industri. Inflasi, dan pendidikan. Hasil dari penelitian ini adalah variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin walaupun pengaruhnya kecil. Penelitian *Sukmaraga* (2011) menganalisis mengenai pengaruh variabel indeks pembangunan manusia. PDRB perkapita, dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah, PDRB perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Dan jumlah pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah. *Prasetyo* (2010) dengan judul “ Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus di 35 Kabupaten Kota di Jawa Tengah 2003-2007)” menggunakan alat analisis regresi panel data menyimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan pendidikan berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin, sedangkan variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin. *Sitepu* (2005) dengan judul “Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia: Pendekatan Computable General Equilibrium Model” Hasil dari penelitian ini adalah investasi sumber daya manusia berdampak langsung terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Investasi kesehatan dan investasi pendidikan sama-sama dapat mengurangi tingkat kemiskinan, namun investasi kesehatan memiliki persentase yang paling besar. *Wongdesmiwati* (2009) dengan judul “ Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia”, menggunakan metode analisis regresi berganda, menggunakan variabel jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan pendidikan.

Hasil penelitian ini adalah variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penambahan jumlah penduduk miskin, variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel angka melek huruf berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

### **Kriteria dan Ukuran Kemiskinan**

Kemiskinan saat ini sudah menjadi masalah pembangunan yang bersifat multidimensi. Kemiskinan dapat dengan mudah diketahui dan ditandai dengan kondisi keterbelakangan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan dari sisi ekonomi, serta banyaknya jumlah pengangguran penduduk, yang selanjutnya menjadi pemicu ketimpangan pendapatan dan kesenjangan antargolongan penduduk. <sup>3</sup>Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi kehidupan dengan standar kehidupan yang sangat rendah. Kemiskinan dapat juga didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kehidupan dasar sebagai manusia khususnya makanan dan pakaian. Beberapa konsep kemiskinan yang umum dikenal yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut dapat digolongkan kedalam dua bagian yaitu (a) kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan (b) kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Kemiskinan relatif yaitu tidak memiliki batas kemiskinan yang jelas. Sebagai analogi adalah seseorang yang tinggal dikawasan elit, yang sebenarnya memiliki pendapatan yang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, tetapi pendapatannya masih jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan masyarakat sekitarnya. Orang atau keluarga tersebut merasa dirinya masih miskin. Kemiskinan ini lebih banyak ditentukan lingkungannya. Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif adalah konsep kemiskinan yang mengacu pada kepemilikan materi

dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang atau sekeluarga. Kedua istilah itu menunjuk pada perbedaan sosial yang ada dalam masyarakat berangkat dari distribusi pendapatan. Perbedaannya adalah bahwa pada kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan angka-angka nyata (garis kemiskinan) dan atau indikator atau kriteria yang digunakan, sementara pada kemiskinan relatif kategori kemiskinan ditentukan berdasarkan perbandingan relatif tingkat kesejahteraan antar penduduk. Kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan subjektif merupakan konsep pengukuran kemiskinan yang dilakukan secara statis. Sedangkan kemiskinan subjektif diukur berdasarkan persepsi dari penduduk atau rumah tangga itu sendiri. Kelebihan dari pendekatan kemiskinan subjektif ini adalah bahwa pengukuran kemiskinan dapat dilakukan secara mudah sehingga hasilnya dapat disajikan lebih cepat, lebih sering dan lebih teratur (Kriyantono Rachmat: 2012:36).

Ukuran-ukuran kemiskinan yang dirancang belum memadai dalam upaya pengentasan kemiskinan secara operasional, strategi pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tidak dibarengi pemerataan merupakan kesalahan yang dilakukan dinegara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dalam menjalankan strategi tersebut pinjaman luar negeri telah memainkan peran besar sebagai sumber pembiayaan. Padahal sering terjadi adanya ketidak sesuaian antara paket pembangunan yang dianjurkan donor dengan kebutuhan riil masyarakat. Kebijakan fiskal dan moneter juga tidak pro kaum miskin, pengelolaan sumber daya alam kurang hati-hati dan tidak bertanggung jawab, perencanaan pembangunan bersifat top-down, pelaksanaan program berorientasi keproyekan, misleading industrialisasi liberalisasi perekonomian terlalu dini tanpa persiapan yang memadai untuk melindungi kemungkinan terpinggirkannya kelompok-kelompok miskin dalam masyarakat (Khomsan ali,2015:41).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan suatu permasalahan kemiskinan penduduk dengan mendekatkannya berdasarkan kriteria ukuran kemiskinan. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder dari bahan-bahan literatur yang relevan dengan judul tulisan dan referensi lain

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Persoalan kemiskinan sudah bersifat multidimensi atau sangat kompleks. Sehingga angka kemiskinan hanya dapat diturunkan secara optimal apabila semua pihak termasuk masyarakat miskin itu sendiri ikut terlibat dalam proses pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan.

Berikut ini 14 kriteria keluarga miskin antara lain: (1). luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> perorang. (2). jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan, (3). jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/dinding tembok tidak diplester, (4) tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain, (5). sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik, (6). sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan, (7). kayu bakar/arang/minyak tanah sebagai bahan bakar memasak sehari-hari, (8). Mengonsumsi daging/susu/ayam/ satu kali dalam 1 minggu, (9). hanya membeli satu setel pakaian baru dalam setahun, (10). hanya sanggup makan satu kali/dua kali dalam 1 hari, (11). tidak sanggup membayar pengobatan dipuskesmas/poliklinik, (12). sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lain dengan pendapatan dibawah Rp600.000 perbulan, (13). pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya tamat SD, dan (14). tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual dengan nilai Rp500.000 seperti sepeda motor, emas,

ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. Indikator kemiskinan tersebut membutuhkan penyelesaian untuk mengatasinya baik dari aspek ekonomi maupun non ekonomi (Iryanti R,2016:9).

Gambaran kemiskinan dari perspektif ilmu sosial adalah: (1). Dimensi kemiskinan berdasarkan perspektif ilmu ekonomi: Berdasarkan sudut pandang ekonomi, <sup>5</sup> kemiskinan adalah bentuk ketidakmampuan dari pendapatan seseorang maupun sekelompok orang untuk mencukupi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar. dimensi ekonomi dari kemiskinan diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan seseorang baik secara finansial maupun jenis kekayaan lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. kemiskinan memiliki dua aspek yaitu aspek pendapatan dan aspek konsumsi/pengeluaran. Aspek pendapatan dapat dijadikan sebagai indikator kemiskinan yakni pendapatan perkapita sedangkan untuk aspek konsumsi dapat digunakan sebagai indikator garis kemiskinan. (2). Dimensi kemiskinan berdasarkan perspektif ilmu politik: Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi akan mengancam nilai-nilai demokrasi yang dianut seluruh negara di dunia. Kemiskinan merupakan perkara besar dinegara-negara berkembang, hal ini dikarenakan jika kemiskinan dibiarkan semakin buruk maka akan menimbulkan konsekuensi politik dan sosial yang serius sehingga pemerintahan bisa jatuh karena amukan rakyat miskin yang sudah tak tahan lagi menghadapi kemiskinannya. (3). Dimensi kemiskinan berdasarkan perspektif ilmu sejarah: Kemiskinan sudah eksis sejak ribuan tahun yang lalu, beberapa catatan sejarah yang tercatat tidak hanya berkisah tentang perang raja, ratu & prajurit tetapi juga tentang kemiskinan. secara tidak langsung hal ini diketahui dengan adanya anjuran berbuat baik kepada orang-orang yang kurang beruntung atau miskin. Dengan demikian kemiskinan bukan hal yang baru bagi homo sapiens/manusia, karena kemiskinan telah tergambar dan ada sejak ribuan tahun yang lalu. (4). Dimensi kemiskinan berdasarkan perspektif ilmu sosiologi: Merupakan suatu keadaan yang terjadi pada seseorang dengan kondisi tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan dalam kelompok sosial, selain itu kemiskinan dianggap tidak mampu memanfaatkan tenaga mental ataupun fisiknya dalam pergaulan ditengah-tengah kelompok masyarakat luas. Kondisi ini menjadi salah satu masalah sosial dalam kehidupan manusia, yaitu problem dan persoalan akan rentan terjadi. Bagi masyarakat yang memiliki ekonomi tinggi akan mendapatkan status/kedudukan yang baik sedangkan bagi masyarakat yang memiliki perekonomian buruk/miskin akan mendapatkan status sosial yang rendah. (5). Kemiskinan berdasarkan perspektif ilmu geografi: Ketika mengkaji masalah kemiskinan dari sudut pandang geografi ada beberapa hal yang perlu diketahui. Misalnya dimana lokasi kemiskinan tersebut, apakah diwilayah perkotaan atau pedesaan, apakah dikawasan industri/pertambangan/wilayah pertanian dan apakah terjadi dinegara berkembang/negara maju. dan juga bagaimana pola persebarannya apakah tersebar diseluruh wilayah atau hanya didaerah tertentu saja. serta relasi atau keterkaitan antara masalah kemiskinan dengan aspek alamiah dan sosial diwilayah tersebut. seperti ketersediaan sumber daya alam, kualitas penduduk misalnya tingkat pendidikan/penguasaan ilmu pengetahuan & teknologi, tingkat kesehatan serta prasarana & sarana transportasi yang menghubungkan dengan wilayah lain disekitarnya.

Dari uraian diatas sesungguhnya perlu dipahami bahwa kemiskinan adalah sebuah fenomena multi fase, multi dimensional dan terpadu. Hidup miskin tidak hanya diartikan hidup dalam kondisi kekurangan sandang, pangan & papan tetapi hidup dalam kemiskinan juga dapat diartikan akses yang rendah terhadap berbagai ragam sumber daya dan aset produktif yang sangat diperlukan untuk dapat memperoleh sarana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang paling mendasar seperti informasi, transportasi, pendidikan, kesehatan, teknologi, dan ekonomi.

Kemiskinan yang tergambar pada umumnya dapat dikategorikan pada kemiskinan semi absolut. dalam hal ini masyarakat telah mampu memenuhi kebutuhan pokok dan mereka memiliki pendapatan. namun kebutuhan pokok (makan) yang ada belum memenuhi standar gizi yang layak. Dibidang kesehatan dan pendidikan masyarakat juga dikategorikan semi absolut karena masih ada beberapa keluarga yang tinggal dirumah kurang layak dan juga masih banyak yang putus sekolah akibat dari keterbatasan ekonomi.

Chambers mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi yaitu kemiskinan (proper), ketidakberdayaan (powerless), kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), ketergantungan (dependance) dan keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis. Kemiskinan tidak hanya kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah tetapi juga banyak hal lain seperti tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidak berdayaan menentukan jalan hidup sendiri.

Masalah kemiskinan dimanapun adalah masalah yang sangat sulit untuk diselesaikan. Berikut ada cara yang dapat dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan antara lain: a).perluas jangkauan layanan keuangan bagi masyarakat miskin dan tingkatkan akses usaha

mikro dan kecil ke pinjaman komersial, b).perbaiki fokus kepada kemiskinan dalam perencanaan dan penganggaran ditingkat nasional untuk penyediaan layanan, c).pengembangan secara utuh sistem jaminan sosial komprehensif yang mampu menangani resiko dan kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat miskin dan hampir miskin, d).lakukan investasi dibidang kesehatan dengan fokus pada perebaikan mutu layanan kesehatan dasar (oleh pemerintah dan swasta) dan akses yang lebih baik kelayanan kesehatan. e).tangani krisis sanitasi yang dihadapi Indonesia dan masyarakat miskinnya. f).membuat peraturan ketenagakerjaan yang lebih fleksibel, g).perkuat monitoring dan kajian terhadap program pengentasan kemiskinan.

## **KESIMPULAN**

Kemiskinan selalu hadir dalam setiap masyarakat, baik itu masyarakat modern/kota, terlebih lagi pada masyarakat yang masih sederhana/desa. Upaya pengentasan kemiskinan pun sudah dilakukan dengan berbagai cara, baik itu menggunakan pendekatan top-down maupun bottom-up, walaupun hasilnya belum signifikan, tetapi tetap harus berupaya agar kemiskinan dapat segera dikurangi. Perlu adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat agar kemiskinan itu dapat diminimalisir. Berbagai macam program pengentasan kemiskinan telah diterapkan guna mengatasi fenomena kemiskinan. kurang tepatnya penanggulangan yang dilakukan mengakibatkan fenomena kemiskinan akan selalu ada. Dengan adanya kegagalan tersebut maka perlu adanya strategi yang tepat untuk menanggulangi dan mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia agar cita-cita untuk pengentasan kemiskinan & pemerataan pembangunan yang ada pada UUD 1945 mampu diwujudkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008). *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*.
- Iryanti, R. (2016). *Strategi Nasional Dalam Pencapaian Target Pengurangan Kemiskinan Tahun 2019*
- Khomsan, Ali, et all. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Kriyantono, Rachmat. 2012. *Practical Communication Research Techniques*. Jakarta Pemerintah Kota Yogyakarta. (2017). Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017

- Prasetyo (2010). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan studi kasus:35 Kabupaten Kota di Jawa Tengah.*
- Rahardjo , D. (2016)tuchan, Mickael B Hoelman, 7 Victoria Fanggidae (Eds). *Transformasi Kesejahteraan Pemenuhan Hak Ekonomi dan Kesehatan Manusia* (pp.xxv.xxxviii). Jakarta:LP3ES
- Ras A. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan.* Jurnal Socius, Oktober-Desember 2013 Hal 56-63.
- Sitepu (2005). *Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia: Pendekatan Computable General Equiliberium*
- Model.Sukmaraga (2011). *Pengaruh variabel indeks pembangunan manusia, PDRB perkapita, Jumlah pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah.*
- Wongdesmiwati (2009). *Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia.*
- Yarlina Yacoub (2012). *Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.*